BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran harus dibuat sebelum melakukan pembangunan karena dengan adanya perencanaan dan penganggaran, usaha-usaha pemerintah akan lebih banyak berhasil apabila disusun dengan kebijakan-kebijakan sehingga memberikan arah yang jelas bagi kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran terdapat beberapa dokumen yang dihasilkan untuk melakukan kegiatan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dokumen yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD ini harus dilakukan setiap tahun karena dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan dana pada tahun bersangkutan. Tujuan RKPD dilakukan sebagai pengarahan proses penyusunan KUA, PPAS, RAPBD, dan APBD. RKPD merupakan penjabaran dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, proritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilakukan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dibantu partisipasi oleh masyarakat, dengan mengacu kepadaa rencana kerja pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). RAPBD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggung jawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada tingkat daerah.

Dalam perencanaan dan penganggaran, RKPD berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggara urusan wajib daerah serta untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah dan mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD. Jika RKPD ini tidak diterapkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan pemerintah daerah maka pelaksanaan kegiatannya tidak akan berjalan dengan baik karena acuan penyelenggaraan kegiatan pembangunan tidak tersusun dengan baik sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mengenai sasaran pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan tahapan yang saling berkaitan untuk kegiatan pembangunan yang disusun oleh setiap instansi pemerintah yaitu dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman. Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan

judul : **"Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Kegiataan Pembangunan Daerah Di BAPPEDA Kabupaten Pasaman."**

1.2 Perumusan Masalah

Sebagai yang telah diuraikan diatas tentang perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan, merupakan proses mempersiapakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Agar penulis ini menjadi lebih baik maka penulis mencoba merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Mekanisme Penyusunan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Daerah di BAPPEDA Kabupaten Pasaman ?
2. Bagaimana Mekanisme Penyusunan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah di BAPPEDA Kabupaten Pasaman ?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam pelaksanaan magang ini antara lain adalah :

1. Ingin mempelajari tentang Mekamisme Perencanaan Kegiatan Pembangunan Daerah di BAPPEDA Kabupaten Pasaman.
2. Ingin mempelajari tentang Mekanisme Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah di BAPPEDA Kabupaten Pasaman.

1.4 Manfaat Penulisan Laporan

Adapun manfaat laporan adalah :

1. Untuk mendapatkan pengalaman dan memahami dunia kerja serta mengaplikasikan teori yang didapat penulis dengan mengimplementasikannya didunia kerja.
2. Dapat membantu instansi pemerintah untuk menyelesaikan tugasnya.
3. Menambah wawasan dan pengalaman dalam berinteraksi dengan pegawai dinas dilingkungan kerja.
4. Mahasiswa belajar bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
5. Meningkatkan kedisiplinan pribadi mahasiswa.
6. Memahami cara kerja instansi tempat mahasiswa melaksanakan magang.
7. Mempelajari hal-hal yang dibutuhkan sebelum memasuki dunia kerja.
8. Membentuk kepribadian yang bertanggung jawab dan bijaksana yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam pelaksanaan magang ini saya sebagai penulis memilih tempat magang yaitu pada kantoe Bappeda Kabupaten Pasaman. Kegiatan ini dilaksanakn selama 40 hari kerja dari tanggal 22 Juni s/d 14 Agustus 2015. Selama jangka waktu tersebut penulis berharap dapat melakukan kegiatan magang dengan baik dan memuaskan. Penulis juga dapat ditempatkan pada bagian-bagian yang sesuai dengan judul laporan magang dan dapat bersosialisasi dengan para pegawai. Dengan pelaksanaan kegiatan magang ini, diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu dan pengalaman penulis.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam melalukan pembahasan laporan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan laporan, manfaat penulisan laporan, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdiri dari Kerangka teori berisi tentang pengertian dan dasar hukum perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan serta bagian-bagian dari perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan tersebut.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Berisi gambaran umum kantor Badan Perencanaan dan Penganggaran Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman, fungsi Bappeda, struktur organisasi Bappeda Kabupaten Pasaman, sumber daya dan tugas-tugas masingnya pada badan perencanaan pembangunan daerah, visi serta misi Bappeda.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang bagaimana mekanisme perencanaan dan penganggaran di BAPPEDA Kabupaten Pasaman.

UNIVERSITAS ANDALAS

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari laporan magang dan saran-saran dari penulis untuk perbaikan kedepannya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA